

**TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
WARGA SIPIL**

SKRIPSI

Oleh :

Atiya Amertha Putri Lesmana

201510115189



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Dinas
Perhubungan Terhadap Warga
Sipil.**

Nama Mahasiswa : **Atiya Amertha Putri Lesmana**

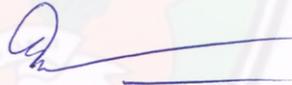
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115189

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 9 Juli 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum

Drs. Octo Iskandar. SH., MH

NIDN: 0313047703

NIDN: 0205105601

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH DINAS
PERHUBUNGAN TERHADAP WARGA
SIPII

Nama Mahasiswa : ATIYA AMERTHA PUTRI LESMANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115189

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 08 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H, M.H

NIDN : 0323035802

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H, M.H

NIDN : 0319018502

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H, M.H

NIDN : 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing S.H., M.H.

NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M.

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atiya Amertha Putri Lesmana
Npm : 201510115189
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 01 Mei 1997
Prodi : Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Warga Sipil.

adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 9 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,



Atiya Amertha Putri Lesmana
Atiya Amertha Putri Lesmana

201510115189

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atiya Amertha Putri Lesmana
Npm : 201510115189
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 01 Mei 1997
Prodi : Ilmu Hukum/ Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Warga Sipil".

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 9 Juli 2021

Ya  ataan
Atiya Amertha Putri Lesmana
201510115189

ABSTRAK

Atiya Amertha Putri Lesmana 201510115189, Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Warga Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor: 69/Pid.B/2020 /PN.Tmt)”, Jumlah 80 halaman, 2021.

Kewenangan dinas perhubungan memiliki kewenangan untuk mengecek perizinan beroperasi khususnya transportasi angkutan barang adanya suatu permasalahan contoh pada saat petugas menanyakan izin KIR dan korban yang mengendarai mobil pick up yang tidak membawa kir nya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas lantas korban marah-marah kepada petugas dinas perhubungan dan petugas tidak sengaja mendorong korban hingga terjatuh, permasalahan tersebut ialah Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor: 69/Pid.B/2020/PN.Tmt. Pada karya ilmiah ini yang akan di bahas adalah pemeriksaan perkara Pidana pada Putusan Nomor: 69/Pid.B/2020/PN.Tmt), yang dimana Kewenangan oleh dinas perhubungan yang melakukan tindak pidana penganiyaan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini adalah terdakwa atas nama Rifaldi Djatuni Alias Faldi yang seharusnya bebas karena terdakwa yang sedang menjalankan tugasnya tanpa sengaja mendorong korban hingga terjatuh sesuai yang berdasarkan pada Pasal 352 KHUP dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor: 69/Pid.B/2020/PN.Tmt.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan Pemerintah terkait Lalu Lintas, Asas Legalitas, Tindak Pidana.

Pembimbing :

Fransiska Novita Eleanora SH., M,Hum
Drs. Octo Iskandar SH., MH

ABSTRACT

Atiya Amertha Putri Lesmana 201510115189, *Application of the Authority of the Department of Transportation Related to the Crime of Persecution (Case Study Decision Number: 69 /Pid.B /2020 /PN .Tmt), Total 80 pages, 2021.*

The authority of the transportation agency has the authority to check operating permits, especially for transportation of goods, there is a problem, for example when officers ask for KIR permits and victims who drive a pick-up car that do not carry their kir in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic then victims angry at the transportation service officer and the officer accidentally pushed the victim to fall, the problem was the Tilamuta District Court Decision Number: 69/Pid.B/2020 /PN.Tmt. In this scientific work that will be discussed is the examination of criminal cases in Decision Number: 69 / Pid.B / 2020 / PN.Tmt), which is the authority by the transportation service that commits the crime of abuse.

In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a literature study of secondary data.

The conclusion of this research is that the defendant Rifaldi Djatuni Alias Faldi should be free because the defendant who was carrying out his duties accidentally pushed the victim to fall according to Article 352 KHUP in the Tilamuta District Court Decision Number: 69/Pid.B /2020/PN. Tmt.

Keywords: Legal Certainty, Government Authority related to Traffic, Legality Principles, Crime.

Advisor:

Fransiska Novita Eleanora SH., M, Hum
Drs. Octo Iskandar SH., MH

KATA PENGANTAR

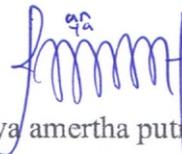
Puji syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayang yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul “ Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Warga Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor: 69/Pid.B/2020 /PN.Tmt)”. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan kontribusi dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Octo Iskandar S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing kedua yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan.
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses masa studi S1. 8. Allah SWT, Orang tua saya yg tercinta Bpk. Harris dan Ibu Netty, juga Mamak Henny di Bangka, beserta abang dan kakak saya Andika, Siska, Ario.
9. Kepada diri Saya sendiri, Cicak Amazon dan Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2015 UBJ regular pagi.
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 9 Juli 2021

Penulis



Atiya amertha putri lesmana

201510115189



DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO.....	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumuasan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.Kerangka, Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.1.1. Negara Hukum.....	7
1.4.1.2. Teori Kewenangan.....	7
1.4.1.3. Teori Perbuatan Pidana	8
1.4.2. Kerangka Konseptual	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran	10
1.5.Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Negara Hukum.....	12
2.1.1. Sejarah Perkembangan Negara Hukum	12
2.1.2. Pengertian Negara Hukum.....	13

2.2.	Teori Kepastian Hukum.....	15
2.2.1.	Perkembangan Kepastian Hukum.....	15
2.2.2.	Pengertian Kepastian Hukum.....	15
2.3.	Teori Kewenangan.....	18
2.3.1.	Perkembangan Kewenangan.....	18
2.3.2.	Jenis-Jenis Kewenangan.....	21
2.3.3.	Kewenangan Pemerintah Terkait Lalu Lintas.....	22
2.4.	Asas Legalias.....	23
2.5.	Teori Tindak Pidana.....	26
2.5.1.	Perkembangan Teori Tindak Pidana.....	26
2.5.2.	Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	27
2.5.3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.5.4.	Asas-Asas Tindak Pidana.....	29
2.6.	Hukum Acara Pidana.....	34
2.7.	Pidana Pemidanaan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis Penelitian.....	40
3.2.	Metode Pendekatan Penelitian.....	41
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4.	Teknik Pengolahan Data.....	43
3.5.	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Analisa Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Kewenangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.....	45
4.2.	Membahas Kendala dalam Tindak Pidana Kekerasaan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Warga Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor: 69/Pid.B/2020 /PN.Tmt)”. Telah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	60
BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan.....	73
5.2.	Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

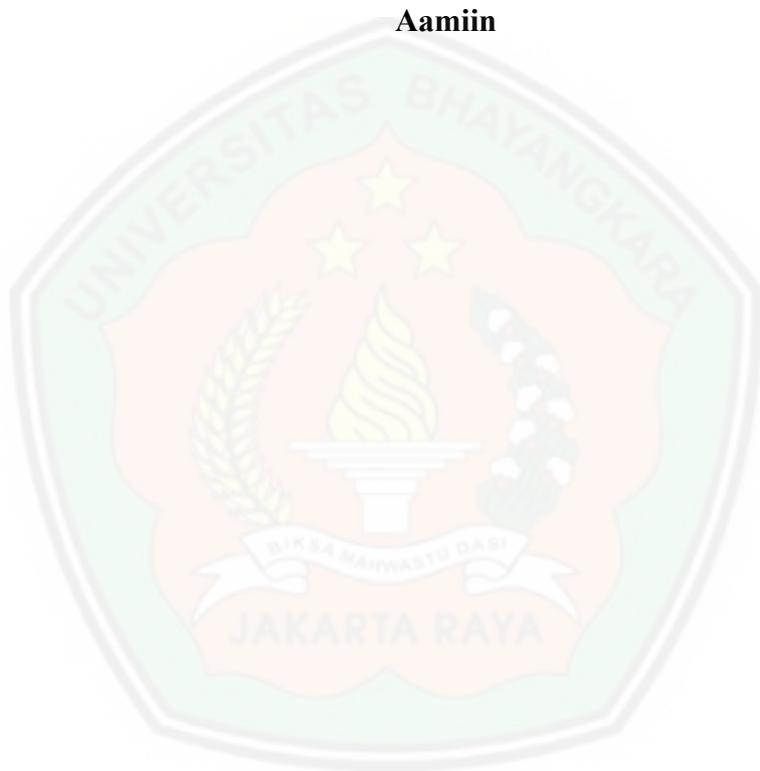
MOTTO :

“ KEEP BLOOMING, LIVE FOR TODAY ”

KUPERSEMBAHKAN:

“ UNTUK KU, DIRIKU DAN MASA DEPANKU YG GLOWING ”

Aamiin



DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
UUDS	Undang-Undang Dasar Sementara
UUD	Undang-Undang Dasar
TUN	Tata Usaha Negara
KTL	Kawasan Tertib Lalu Lintas
SKR	Kegiatan Uji Kendaraan Bermotor
PPNS	Pejabat Pegawai Negeri Sipil
KUHP DAN KUHPA	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara pidana
DISHUB	Dinas Perhubungan
LLAJ	Lalu Lintas Angkutan Jalan